

**Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN**

**Tahun 2007-2017**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Muh Adnan Pratama Annur

NomorMahasiswa : 15313078

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2019**

**Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN  
Tahun 2007-2017**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1  
Program Studi Ilmu Ekonomi,  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Muh Adnan Pratama Annur

Nomor Mahasiswa : 15313078

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak bener maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Maret 2019

Penulis,  
METERAI  
TAMPEL

25419AFF448457428

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Muhammad Adnan Pratama Annur

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun

2007-2017

Nama : Muh Adnan Pratama Annur

Nomor Mahasiswa : 15313078

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 25 - Maret 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Jaka Sriyana,,S.E., M.Si., Ph.D.

# PENGESAHAN UJIAN

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

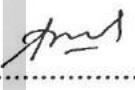
**PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 5 NEGARA  
ASEAN 2007-2017**

Disusun Oleh : MUH ADNAN PRATAMA ANNUR  
Nomor Mahasiswa : 15313078

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Selasa, tanggal: 9 April 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. 

Penguji : Aminuddin Anwar, SE., M.Sc. 

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahilahirabbil'alamin. Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua tercinta Bapak Anwar dan Ibu Nur Aini atas jerih payah, Do'a dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan, terima kasih Bapak dn Ibu.
2. Adik-adik Ananda Akmal Dwi Putra Annur dan Almaqhvira Izmi Annur yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan amanah ini agar dapat terselesaikan tepat pada waktunya terima kasih banyak.
3. Teman-teman Ilmu Ekonomi, khusus nya keluarga besar Ilmu Ekonomi 2015 yang selalu kompetitif untuk mendukung mneyelesaikan segala kewajiban selama proses perkuliahan ini

**MOTTO :**

“ Barangsiapa yang memberatkan seorang muslim muslim,maka ia akan diberi kesulitan juga  
oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala”

-HR Abu Dawud-

“ Segala sesuatu itu tergantung cara pikir kita,tetaplah berfikiran baik agar semuanya baik  
pula”

-Penulis-



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas rahmat daan karunia yang diberikan Allah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pengaruh *Good Governance Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017*, Skripsi ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Setrata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, karenanya penulis mengucapkan terima kasih untuk kritik dan saran yang telah diterima maupun yang akan diterima. Penyusun skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Jaka Sriyana „S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Sahabudin Sidiq, MA., Ph.D selaku Ka-Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Jaka Sriyana „S.E., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ditengah kesibukannya dengan sabar dan penuh perhatian membimbing serta memberikan dukungan moril hingga skripsi ini selesai.
4. Yth. Bu Diana Wijayanti,„S.E.,M.Si. dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan pencerahan dan selalu menerima konsultasi mengenai masalah akademik selama kuliah, Terimakasih sudah banyak membantu hingga akhirnya sampai di tahap akhir ini.

5. Orangtua tercinta Bapak Anwar dan Ibu Nur Aini atas jerih payah, Do'a dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin terbalaskan, terima kasih Bapak dn Ibu.
6. Seluruh rekan-rekan FMIE 2017-2018 yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam organisasi serta mampu mengasah softskill dan public speaking, Terimakasih banyak.
7. Seluruh rekan-rekan Ilmu Ekonomi 2015, teman-teman kontrakan Hammers Snake, teman-teman Jarang Goyang dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian adalah teman-teman terbaik, bersama kalian penulis bisa menemukan arti persahabatan dan kekompakan, sukses buat kalian semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 9 April 2019

Penulis,

Muh Adnan Pratama Annur



# DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN UJIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO :.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	20
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	21
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	23
2.2. Landasan Teori .....	28
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	28
2.2.2. Teori Ekonomi Klasik.....	31
2.2.2.1. Teori Adam Smith.....	31
2.2.2.2. Teori David Ricardo .....	33
2.2.2.3. Teori Solow-Swan .....	34
2.2.2. <i>Good Governance</i> .....	35
2.2.3.1. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i> .....	37
2.2.3.2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	38
2.2.3.3. Karakteristik <i>Good Governance</i> .....	44
2.2.3.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governanment Governance</i> ) .....	50
2.3. Kerangka Pemikiran .....	54
2.4. Hipotesis Penelitian.....	55
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1. Jenis dan Sumber Data.....	57
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	57
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	57
3.3. Model Analisis .....	59

3.3.1.	Analisis Regresi Data Panel .....	59
3.3.1.3.	Asumsi Regresi Data Panel .....	60
3.3.2.	Estimasi Regresi Data Panel .....	60
3.3.2.1.	Metode <i>Common Effect</i> atau <i>Pooled Least Square (PLS)</i> .....	60
3.3.2.2.	Metode <i>Fixed Effect (FEM)</i> .....	61
3.3.2.3.	Metode <i>Random Effect (REM)</i> .....	61
3.3.3.	Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel .....	61
3.3.3.1.	Chow Test .....	62
3.3.3.2.	Hausman Test.....	63
3.3.4.	Uji Analisis Statistik.....	64
3.3.4.1.	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64
3.3.4.2.	Uji F.....	65
3.3.4.3.	Uji Signifikasi Parsial (Uji t).....	66
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
4.1.	Deskripsi Data Penelitian .....	67
4.2.	Hasil dan Analisis.....	69
4.2.1	Uji Chow .....	69
4.2.1.1	Uji Hausman .....	70
4.2.3.	Model Regresi Panel <i>Fixed Effect</i> .....	71
4.2.4.	Hasil Uji Analisis Statistik.....	73
4.2.4.1.	Uji $R^2$ (Koefisien Determinasi).....	73
4.2.4.2	Uji F.....	74
4.2.4.3	Uji T.....	75
4.2.3	Interprestasi Data .....	77
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....</b>	<b>79</b>
5.1.	Kesimpulan.....	79
5.2.	Implikasi .....	81
	DAFTAR PUSTAKA .....	82
	LAMPIRAN.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%) .....	8
Tabel 1. 2 Government Effectiveness 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%) .....	10
Tabel 1. 3 Political Stability and Absence of Violence 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)12	
Tabel 1. 4 Regulatory Quality 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%).....	14
Tabel 1. 5 Voice and Accountability 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%).....	16
Tabel 1. 6 World Governance Index .....	53
Tabel 1. 7 Statistik Deskriptif .....	68
Tabel 1. 8 Uji Chow dengan Redundant Test.....	69
Tabel 1. 9 Uji Hausman.....	70
Tabel 1. 10 Model Random Effect.....	71



## DAFTAR GAMBAR

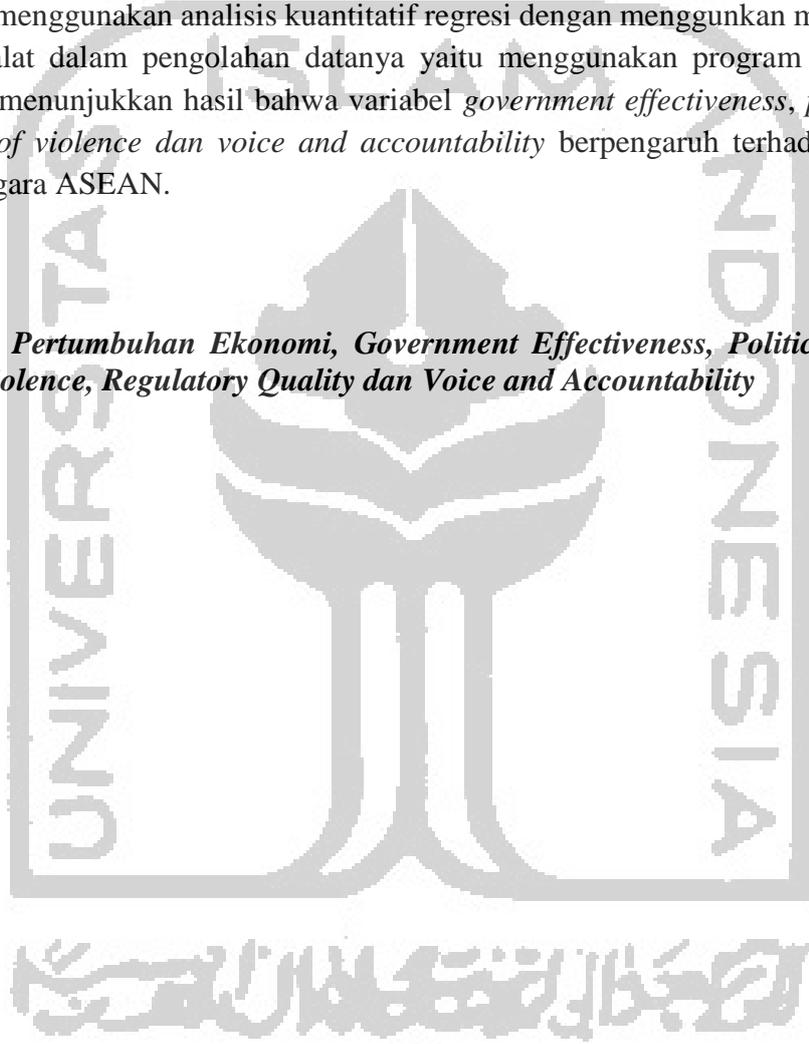
Gambar 1. 1 rata-rata Government Efectiveness di 5 negara ASEAN.....	11
Gambar 1. 2 rata-rata Politocal Stability and Absance Violance di 5 negara ASEAN .....	14
Gambar 1. 3 rata-rata Regulatory Quality di 5 negara ASEAN .....	16
Gambar 1. 4 rata-rata Voice and Accountability di 5 negara ASEAN.....	18



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Governance terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN. Data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau ruang (*cross section*) yang diambil dari *World Bank*, sedangkan data untuk data antar waktu (*time series*) diambil pada tahun 2007 – 2017 dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Data yang merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series* yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan data panel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel dan sebagai alat dalam pengolahan datanya yaitu menggunakan program Eviews 9. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel *government effectiveness*, *political stability and absence of violence* dan *voice and accountability* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 5 negara ASEAN.

***Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, Regulatory Quality dan Voice and Accountability***



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas tata kelola (*governance*) akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hipotesis dibangun untuk menduga pengaruh antar dimensi tata kelola (*governance*) terhadap pertumbuhan. Worldwide Governance indikator yang meliputi enam dimensi, yakni, *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, dan voice and accountability* digunakan untuk mengukur tata kelola (*governance*).

Dengan menyelidiki pengaruh beberapa aspek tata kelola (*governance*), penelitian ini menyelidiki pengaruh semua indikator tata kelola (*governance*), sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan tata kelola (*governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi, jika pemerintah berkeinginan meningkatkan pertumbuhan dalam rangka kesejahteraan warganya, maka pemerintah tersebut perlu memperbaiki tata kelola (*governance*) dalam menjalankan pemerintahannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk menganalisis hasil dari proses pembangunan ekonomi suatu negara ataupun wilayah, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas

perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode tertentu yang bisa menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Sukirno, 2008)

Kinerja perekonomian negara yang baik, salah satunya ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Desi, 2015), pertumbuhan ekonomi selama ini baru dianalisis dari faktor-faktor ekonomi semata seperti pajak, FDI (*Foreign Direct Investment*), investasi, inflasi, suku bunga. Salah satu faktor yang sifatnya kuantitatif dan belum banyak diteliti dari sisi tata kelola pemerintahan. Penelitian bidang ini menjadi menarik karena ternyata dengan tata kelola pemerintahan yang baik memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang efisien (Widodo, 2014). Upaya mewujudkan ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintah sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2013).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh World Bank, UNDP dan Asian Development Bank (ADB), kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan menyangkut tata pemerintahan. Mengacu pada

laporan World Bank yang ditulis oleh (Kaufman, Kraay, & Lobaton, 2011), terdapat hubungan langsung *good governance, stable government*, dan sosial ekonomi yang lebih baik bahkan *good governance* dijadikan aspek pertimbangan lembaga donor dalam memberikan pinjaman maupun hibah, bahkan tata kelola yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Di setiap negara berkembang pasti ingin melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat menjadi negara maju, serta dapat mewujudkan tujuan untuk memakmurkan masyarakat dan meratakan pembagian pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan, ASEAN terdapat 5 negara yang tergolong dalam perekonomian terbaik, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Singapura Negara dengan perekonomian terbaik dan termapan di ASEAN, negara yang luasnya tidak seberapa ini merupakan satu-satunya negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara, hal ini memberikan makna bahwa tidak selamanya negara besar yang makmur, dengan wilayah yang begitu sempit Singapura menunjukkan kedudukannya sebagai negara maju. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya kedua dengan rata-rata pendapatan US\$ 36.609(Rp. 490,56 juta), negara yang mempunyai satu daratan dengan Indonesia dan Malaysia, negara ini memiliki bentuk pemerintahan yang berupa kerajaan, meskipun memiliki kawasan yang kecil tetapi memiliki tambang gas alam yang melimpah, sehingga gas alam inilah yang menjadi komoditas unggulan Brunei Darussalam untuk di ekspor. Malaysia merupakan negara terkaya ketiga, negara yang memiliki kawasan yang cukup luas ini mengunggulkan komoditas berupa barang-barang tambang, negara

yang masih termasuk serumpun dengan Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan wilayahnya memiliki karakteristik yang cukup sama dengan negara kita Indonesia. Thailand yang di kenal sebagai negeri gajah putih merupakan negara terkaya keempat, negara yang memiliki julukan sebagai negara lumbung padi dunia ini memanfaatkan komoditas alam nya seperti pertanian. Indonesia merupakan negara terkaya kelima, Negara dengan luas wilayah yang sangat besar ini dan memiliki sumber daya alam yang melimpah serta memiliki rakyat yang cukup banyak.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipacu melalui proses pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan serta hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, diantara golongan minoritas masyarakat yang berpendapatan tinggi atau dari golongan masyarakat berpendapatan rendah, penyerahan kewajiban pembangunan ekonomi apabila dilimpahkan kepada kalangan masyarakat berpendapatan tinggi, maka mereka akan mampu memacu pertumbuhan dengan baik, namun jika yang dipilih adalah mayoritas golongan masyarakat berpendapatan rendah, maka hasil-hasil pembangunan harus dibagi secara merata dan hal ini kurang memungkinkan tercapainya *Gross National Produk* secara nasional pada tingkat yang lebih tinggi (Tofaro, 2013), ASEAN adalah organisasi tingkat suatu kawasan yang mewadahi jalur-jalur kerjasama negara-negara di Asia Tenggara, ASEAN di dirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok (Thailand) oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, berdirinya ASEAN yang dimana bertujuan untuk menciptakan kerjasama dalam hal pertumbuhan ekonomi, perdamaian dan stabilitas serta perkembangan sosial budaya di kawasan ASEAN (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia).

Perkembangan perekonomian dunia semakin mendekati integrasi perekonomian yang semakin luas, salah satunya integrasi di kawasan Asia Tenggara yang melahirkan bentuk integrasi baru yaitu pembentukan komunitas ASEAN, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah 21 tahun pembentukannya berlangsung, pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur Malaysia, pada KTT ke-22 deklarasi ASEAN *Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 mendeklarasikan pembentukan MEA pada tahun 2015 (Kurnianingrum, 2015).

Hasil dari bahasan deklarasi ASEAN *Concord II* tersebut adalah adanya integrasi di kawasan Asia Tenggara dalam 3 bidang utama yaitu, keamanan, ekonomi dan sosial-budaya, integrasi ekonomi ini menjadi perhatian lebih karena dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dari masing-masing negara kawasan integrasi ekonomi yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan adanya aliran perekonomian yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah, perbedaan latar belakang ekonomi masing-masing negara diharapkan tidak lagi menjadi suatu penghalang untuk masyarakat luas dalam merespon integrasi ekonomi tersebut.

MEA merupakan salah satu bentuk integrasi yang disepakati dengan tujuan meningkatkan daya saing ASEAN, modal asing dibutuhkan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN, ASEAN sendiri telah meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat melalui ASEAN *Vision 2020* saat berlangsungnya ASEAN *Second*

*Informal Summit*. inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan Of Action* yang disepakati pada tahun 1998.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah suatu negara dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi biasa digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan kinerja perekonomian negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi bukanlah perkara yang dapat dilaksanakan dengan mudah bagi sebagian negara di dunia, permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian negara seperti tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, angka harapan hidup yang rendah, tingkat Pendidikan yang rendah dan kesenjangan pendapatan sering terjadi di negara-negara sedang berkembang dan negara terbelakang yang akan berdampak pada rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara kearah yang lebih baik. Menurut (Jhingan, 2012), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembangaan dan ideologis yang diperlakukannya. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari suatu periode ke periode tahun berikutnya. tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai oleh suatu negara dengan melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau *Produk Domestik Bruto* (PDB) setiap tahun (Tambunan D. T., 2001). Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu dari empat tujuan utama kebijakan ekonomi makro. *Gross*

*Domestik Bruto* (GDP) adalah ukuran atas nilai pasat output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktot-faktor produksi baik tanah, tenaga kerja, dan modal yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu (Fair, 2014).

Negara-negara di Asia Tenggara pun memiliki perekonomian yang stabil dan memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan di lingkungan global (Raz, 2012). Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat juga dijalankan oleh negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN dengan visi sampai tahun 2020 adalah memperkuat perekonomian melalui strategi-strategi perekonomian yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan di antara negara-negara dalam satu regional.

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB), walaupun ekonomi global yang lesu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, tetapi ekonomi regional tetap akan mempertahankan pertumbuhan kuat berkat kebutuhan domestik dan aktivitas pembangunan di masing-masing negara kawasan itu, negara-negara kawasan ASEAN menjadi harapan di tengah permasalahan yang terus menggelayuti perekonomian global *United Nation* dalam publikasi *Economics and Social Survey of Asia and Pacific 1997* memproyeksi trend pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN akan tumbuh baik sampai abad XXI. Pertumbuhan ekonomi di negara Kawasan ASEAN menunjukkan trend yang cenderung meningkat.

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)**

Tahun	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	0.155	6.345	6.299	9.112	5.435
2008	-1.94	6.014	4.832	1.788	1.726
2009	-1.765	4.629	-1.514	-0.603	-0.691
2010	2.599	6.224	7.425	15.24	7.514
2011	3.745	6.17	5.294	6.351	0.84
2012	0.913	6.03	5.473	4.083	7.243
2013	-2.126	5.557	4.694	5.111	2.687
2014	-2.35	5.007	6.007	3.884	0.984
2015	-0.567	4.876	5.028	2.241	3.02
2016	-2.466	5.033	4.22	2.397	3.283
2017	1	5.068	5.902	3.619	3.903
Rata-Rata	-0.25473	4.1342	4.53475	4.9792	3.47825

Sumber : World Bank, 2018

Tabel 1.1 bahwa 5 negara di ASEAN, pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata dari tahun 2007-2017 yaitu Indonesia mencapai 4.1342%, Brunei Darussalam dengan -0.25473%, Thailand dengan 3.47825%, Malaysia dengan 4.53475% dan Singapura dengan 4.9792%, pada setiap negara mengalami peningkatan dan penurunan yang berbeda-beda di setiap tahunnya, hal ini dapat dipengaruhi dari tingkat produksi di masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang akan menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perkembangan *Produk Domestik Bruto* atas harga kosntan dibandingkan tahun sebelumnya.

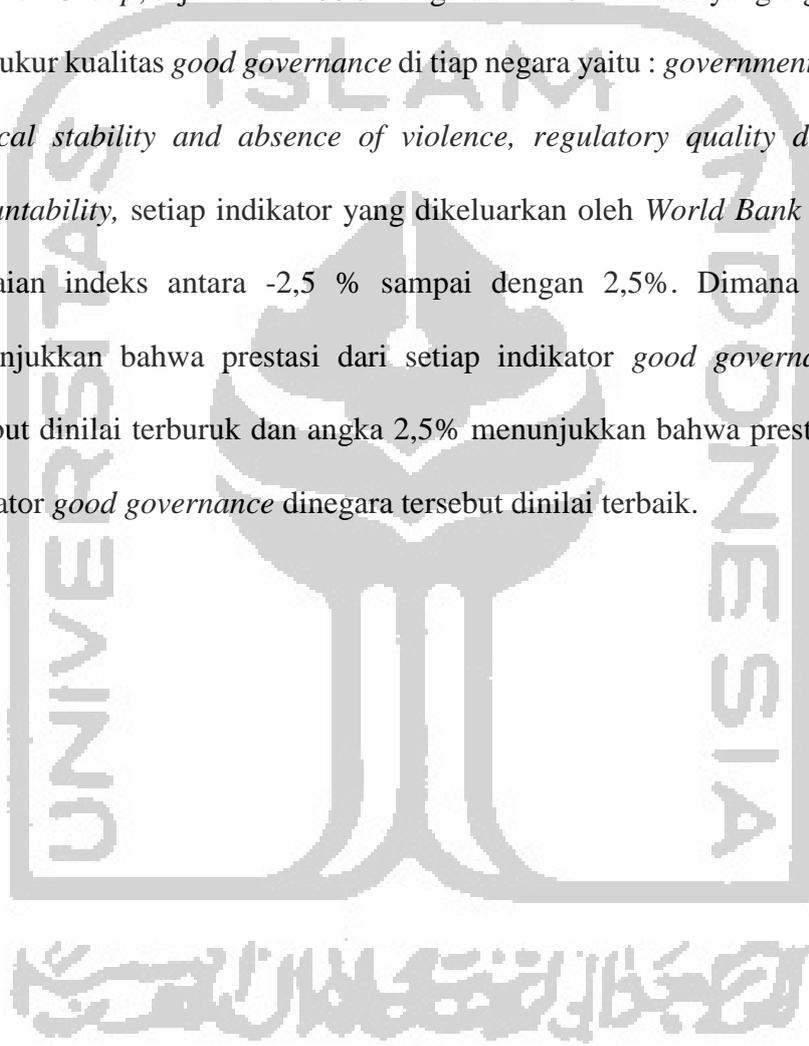
Pencapaian pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan GDP yang memerlukan peran pemerintah didalam perekonomian, pemerintah selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk menerapkan kewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang dapat mendorong perekonomian, kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian juga tak lepas dari kualitas pemerintah itu sendiri, keberhasilan penyelenggaran tata pemerintah yang baik (*good governance*) ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi dari 3 peran utaman yaitu aparatur pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Peran pemerintah dalam pembangunan suatu negara saat ini menjadi semakin penting karena mekanisme pasar yang menjadi andalan kaum kapitalis, yang tidak menghendaki adanya campur tangan pemerintah, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya mengingat krisis ekonomi sudah kerap kali terjadi, aliran *Keynesian* sebenarnya telah mempunyai keyakinan akan munculnya krisis tersebut dengan *argument* bahwa pasar tidak mampu menyelesaikan masalah permintaan dan penawaran, aliran ini berpendapat bahwa suatu saat pasar akan mengalami ketidakseimbangan karena adanya masalah yang sistematis yaitu kegagalan mempertemukan sisi permintaan dan penawaran.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* pertama diusulkan oleh *World Bank*, UNDP dan *Asian Development Bank* (ADB), dan kemudian dikembangkan oleh banyak pakar di negara-negara berkembang guna mewujudkan gagasan-gagasan baik menyangkut tata pemerintahan, mengacu pada

laporan *World Bank* terdapat hubungan langsung antara *good governance, stable government* dan sosial ekonomi yang baik.

*World Bank* melalui *Macroeconomics and Growth Team-Development Research Group*, sejak tahun 1996 mengeluarkan 6 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *good governance* di tiap negara yaitu : *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality* dan *voice and accountability*, setiap indikator yang dikeluarkan oleh *World Bank* menggunakan penilaian indeks antara -2,5 % sampai dengan 2,5%. Dimana angka -2,5% menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terburuk dan angka 2,5% menunjukkan bahwa prestasi dari setiap indikator *good governance* dinegara tersebut dinilai terbaik.



**Tabel 1. 2 *Government Effectiveness* 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)**

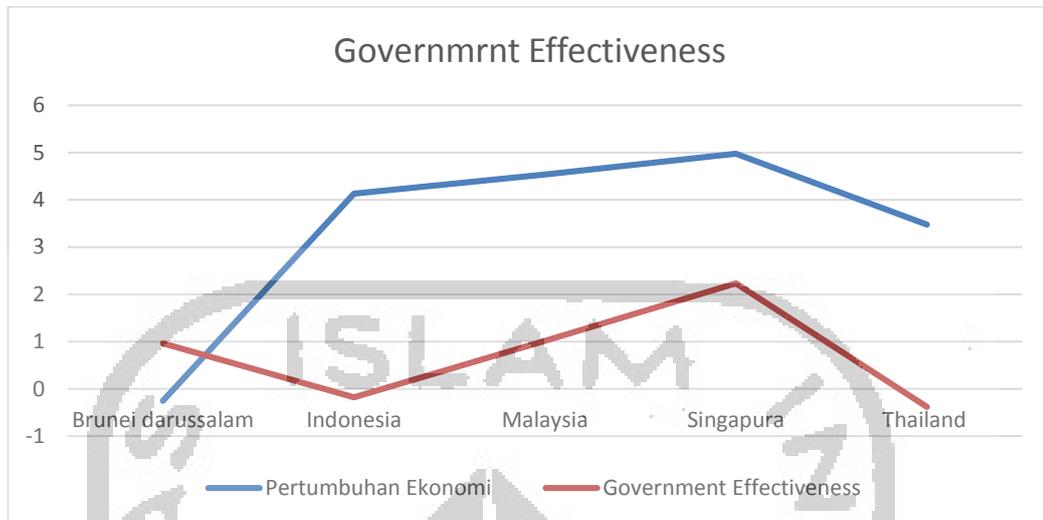
Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
-------	----------	-------------------	-----------	----------	-----------	----------

2007	Government Effectiveness	0.9243966	-0.2771957	1.238987	2.375459	-0.3694969
2008	Government Effectiveness	0.8885025	-0.2372018	1.108519	2.436975	-0.4077929
2009	Government Effectiveness	0.9180717	-0.2981317	0.983706	2.270797	-0.3097054
2010	Government Effectiveness	0.9018937	-0.2143052	1.120518	2.241407	-0.3338629
2011	Government Effectiveness	0.8970225	-0.2594242	1.021163	2.154786	-0.3234649
2012	Government Effectiveness	0.8435253	-0.2729108	0.9198642	2.166091	-0.366163
2013	Government Effectiveness	0.8697733	-0.1987486	0.9998065	2.088955	-0.3435557
2014	Government Effectiveness	1.086335	-0.037205	1.115127	2.182617	-0.4502737
2015	Government Effectiveness	1.060171	-0.2405333	0.9491639	2.236756	-0.4933883
2016	Government Effectiveness	1.084499	0.0075939	0.8747621	2.191794	-0.3890044
2017	Government Effectiveness	1.144513	0.0407612	0.8380826	2.205368	-0.3855207
Rata-rata		0.965337	-0.18066	1.015427	2.23191	-0.37929

Sumber : *World Bank*, 2018

*Government Effectiveness* adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, implementasi kebijakan serta komitmen pemerintah terhadap kebijakan. tabel 1.2 menjelaskan bahwa 5 negara ASEAN, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia mencerminkan prestasi yang baik dengan menunjukkan rata-rata 2.23, 0.96 dan 1.01 Sedangkan Indonesia dan Thailand mencerminkan prestasi yang cukup buruk dengan nilai rata-rata sebesar -0.18 dan -0.37 maka dapat dilihat dari gambar 1.1 di bawah ini:

**Gambar 1. 1 rata-rata Government Efectiveness di 5 negara ASEAN**



Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa efektivitas pemerintah rendah maka pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tinggi, karena pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN bergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *government effectiveness* di lima negara ASEAN sudah berjalan dengan baik.

**Tabel 1. 3 Political Stability and Absence of Violence 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)**

Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	Political Stability and Absence of Violence	1.106725	-1.1963	0.193773	1.174122	-1.11144
2008	Political Stability and Absence of Violence	1.126965	-1.05838	0.108325	1.345581	-1.27144
2009	Political Stability and Absence of Violence	1.387627	-0.75139	-0.04238	1.179446	-1.42479

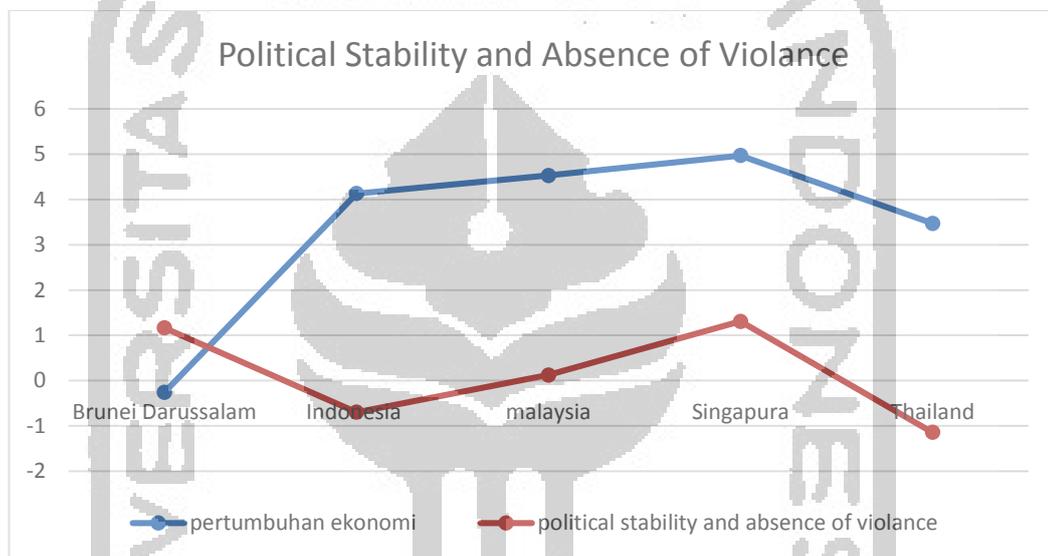
2010	Political Stability and Absence of Violence	1.277547	-0.85392	0.143352	1.169415	-1.44279
2011	Political Stability and Absence of Violence	1.085194	-0.77011	0.07741	1.191422	-1.13353
2012	Political Stability and Absence of Violence	0.9093272	-0.59326	-0.00521	1.368175	-1.21663
2013	Political Stability and Absence of Violence	1.074022	-0.51926	0.051792	1.378178	-1.31168
2014	Political Stability and Absence of Violence	1.261507	-0.41682	0.266619	1.186271	-0.90639
2015	Political Stability and Absence of Violence	1.242662	-0.61506	0.258958	1.311753	-0.99443
2016	Political Stability and Absence of Violence	1.154172	-0.37295	0.136825	1.495759	-0.98858
2017	Political Stability and Absence of Violence	1.189136	-0.51181	0.160816	1.585588	-0.75731
Rata-rata		1.164989	-0.6963	0.122753	1.307792	-1.14173

Sumber : World Bank, 2018

*Political stability and absence of violence* adalah ukuran persepsi bahwa pemerintah akan stabil atau dapat digulingkan oleh undang-undang atau dengan cara kekerasan, pada tabel 1.3 dapat di ketahui bahwa 5 negara ASEAN memiliki *political stability and absence of violence* dengan angka, Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia memiliki prestasi indeks kestabilan politik yang baik

dengan rata-rata tiap negara sebesar 1.30, 1.16 dan 0.12 sedangkan Thailand dan Indonesia menunjukkan prestasi kestabilan politik yang buruk dengan rata-rata tiap negara sebesar -1.14 dan -0.69 maka dapat dilihat dari gambar 1.2 di bawah ini:

**Gambar 1. 2 rata-rata Politocal Stability and Absance Violance di 5 negara ASEAN**



Gambar 1.2 memperlihatkan *Political Stability and Absance Violance* kestabilan tatanan pemerintahan pemerintah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tinggi. Karena pertumbuhan ekonomi negara tergantung pada tata kelola pemerintahannya. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan *Political Stability and Absance Violance* sudah berjalan dengan baik.

**Tabel 1. 4 Regulatory Quality 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)**

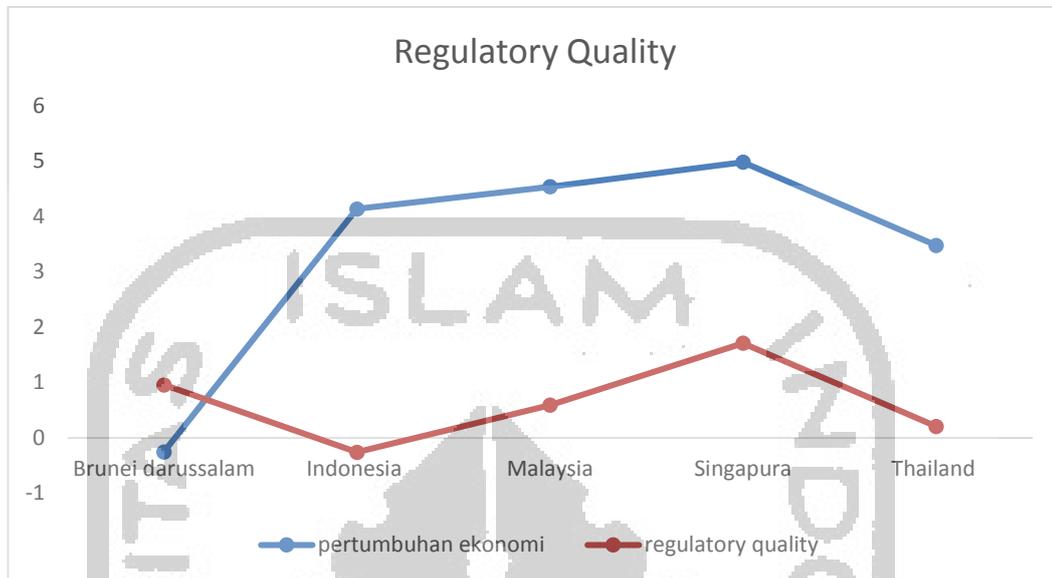
Tahun	Variabel	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
2007	Regulatory Quality	0.9862139	-0.3449852	0.506119	1.612359	0.1428552
2008	Regulatory Quality	0.7837868	-0.3482862	0.3163688	1.606087	0.2105248

2009	Regulatory Quality	1.087068	-0.3617966	0.3036891	1.566005	0.2179662
2010	Regulatory Quality	1.110249	-0.415857	0.5889426	1.625942	0.1737148
2011	Regulatory Quality	1.154296	-0.3519141	0.5820687	1.669992	0.2016357
2012	Regulatory Quality	1.151749	-0.2787625	0.5704837	1.731186	0.2435732
2013	Regulatory Quality	1.105576	-0.1954409	0.636703	1.705524	0.2265044
2014	Regulatory Quality	0.9851288	-0.1076597	0.8377209	1.824775	0.2732638
2015	Regulatory Quality	0.852387	-0.2175578	0.7526733	1.813492	0.2920193
2016	Regulatory Quality	0.5933974	-0.1223439	0.7117952	1.825278	0.1680702
2017	Regulatory Quality	0.7154635	-0.1063154	0.6835025	1.822819	0.1407958
Rata-rata		0.956847	-0.25917	0.590006	1.709405	0.208266

Sumber : *World Bank*, 2018

*Regulatory Quality* merupakan ukuran kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan mempromosikan pengembangan sector swasta, tabel 1.4 menunjukkan bahwa prestasi *regulatory quality* 5 negara ASEAN dari tahun 2007-2017 memiliki prestasi yang baik Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand indeks prestasi yang baik dengan rata-rata tiap negara sebesar 1.70, 0.95, 0.59 dan 0.20. sementara Indonesia menunjukkan prestasi indeks *regulatory quality* yang buruk dengan rata-rata nilai indeks sebesar -0.25 maka dapat dilihat dari gambar 1.3 di bawah ini:

**Gambar 1. 3 rata-rata Regulatory Quality di 5 negara ASEAN**



Gambar 1.3, memperlihatkan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN. Maka indeks *regulatory quality* di lima negara ASEAN dapat ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi semakin baik.

**Tabel 1. 5 Voice and Accountability 5 Negara ASEAN Tahun 2007-2017 (%)**

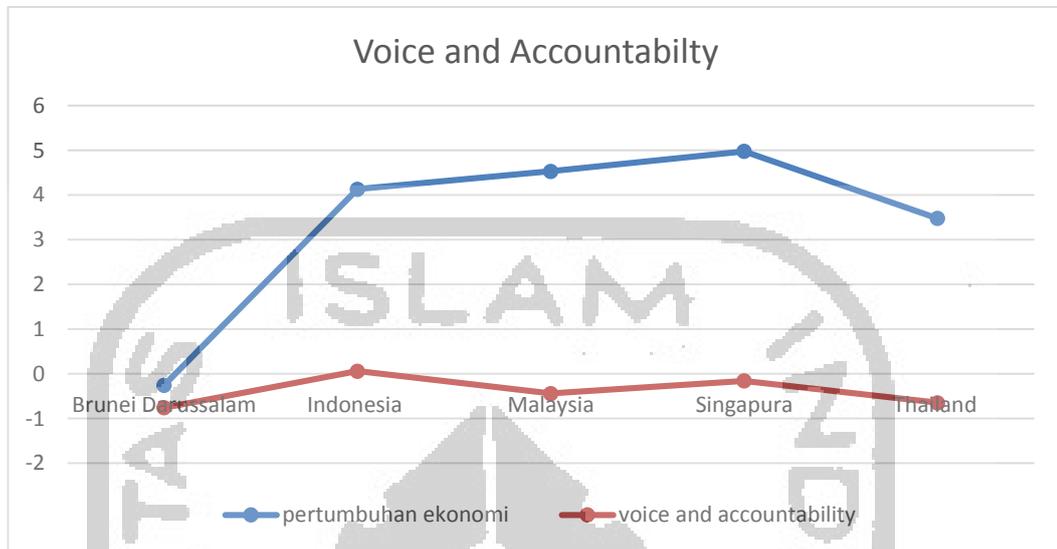
Tahun	Variabel	Brunei darussalam	Indonesia	Malaysia	Singapura	Thailand
-------	----------	-------------------	-----------	----------	-----------	----------

2007	Voice and Accountability	-1.061537	-0.0198048	-0.523537	-0.36321	-0.562502
2008	Voice and Accountability	-1.018134	-0.0112615	-0.563193	-0.334836	-0.529667
2009	Voice and Accountability	-0.7307153	-0.0010406	-0.503895	-0.234221	-0.455884
2010	Voice and Accountability	-0.6505712	-0.0377742	-0.499978	-0.208966	-0.495822
2011	Voice and Accountability	-0.6103393	-0.008531	-0.474875	-0.102027	-0.405182
2012	Voice and Accountability	-0.5063741	0.0676126	-0.346539	0.053091	-0.321141
2013	Voice and Accountability	-0.5050725	0.0361213	-0.339679	0.036768	-0.429926
2014	Voice and Accountability	-0.6250251	0.1539049	-0.360303	-0.098659	-0.874783
2015	Voice and Accountability	-0.7541118	0.1848372	-0.391463	-0.161822	-0.969056
2016	Voice and Accountability	-0.9010231	0.1666685	-0.418355	-0.15045	-1.025071
2017	Voice and Accountability	-0.9484066	0.1298718	-0.400317	-0.169344	-1.047005
Rata-rata		-0.75557	0.060055	-0.43838	-0.15761	-0.64691

sumber : World Bank, 2018

*Voice and Accountability* adalah sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi memilih partai dan pemimpin, serta kebebasan berpendapat, berserikat dan menentukan kebijakan publik, tabel 1.5 memperlihatkan bahwa prestasi ke 5 negara ASEAN tidak begitu baik dari tahun 2007-2017, Indonesia menunjukkan indeks *voice and accountability* yang cukup baik dengan indeks rata-rata 0.06 sedangkan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand menunjukkan indeks *voice and accountability* yang cukup buruk dengan rata-rata sebesar -0.15, -0.43, -0.75 dan -0.64 maka dapat dilihat dari gambar 1.4 di bawah ini:

**Gambar 1. 4 rata-rata Voice and Accountability di 5 negara ASEAN**



Gambar 1.4 memperlihatkan *Voice and Accountability* para pembuat keputusan dalam pemerintah yang baik. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka dengan adanya *Voice and Accountability* yang jelas dapat mengurangi pengambilan keputusan yang merugikan masyarakat.

(Guan, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Growth Theory Needs an Institutional Structure* mengungkapkan bahwa teori pertumbuhan Neoklasik dan Endogen yang dipelopori oleh Solow dan Romer tidaklah cukup untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi, kedua teori tersebut mengabaikan struktur intuisi, padahal intuisi diyakini akan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai pertumbuhan ekonomi. (Barro, 1996), juga mengungkapkan bahwa teori pertumbuhan Endogen tidak berbeda dari teori pertumbuhan yang diungkapkan oleh Solow. Teori ini hanya memperluas variabel model dengan melibatkan komponen modal manusia.

Penelitian yang dilakukan (Hasyim, 2008), menemukan bahwa negara dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki karakteristik institutional yang baik, yang diukur dengan beberapa variabel, seperti efisiensi peradilan, kebebasan ekonomi, tingkat korupsi yang rendah pemerintah yang efektif serta perlindungan terhadap properti. Kebebasan ekonomi adalah faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan investasi, kebebasan ekonomi juga menggambarkan sebuah institusi yang baik.

Menurut (Healey, 2009), tata pemerintahan yang baik adalah efektivitas organisasi tingkat tinggi dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dan yang benar-benar dijalankan, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan. Penelitian (Evans, 1996), berjudul *Bureaucracy and growth : A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economics Growth* mengungkapkan tentang pengaruh birokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pada 35 negara berkembang tahun 1970-1990. Penelitian tersebut menggunakan data GDP sebagai pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor dalam birokrasi dengan kebijakan pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa birokrasi Weberian mempunyai pengaruh yang signifikan dan layak masuk dalam model pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dimana institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan

masyarakat berperan aktif dan positif dalam interaksi sosial melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi lain-lain.

Beberapa data mengenai pertumbuhan ekonomi, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality* dan *voice and accountability* di ASEAN tidak seluruhnya memiliki anggota yang mapan dalam perekonomian (ASEAN Matters For America, 2013), Kondisi yang terjadi seperti Myanmar, Kamboja dan Laos menimbulkan pertanyaan kepada penulis, dimana dengan keadaan *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality* dan *voice and accountability* yang dapat dikatakan buruk namun ketiga negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hal ini berbanding terbalik dengan anggota ASEAN, ketika indikator *good governance* mendapat prestasi yang baik justru ekonominya rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 5 Negara di ASEAN Tahun 2007-2017”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui bahwa *good governance* yang telah berjalan dari tahun 1996 memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik, sistem politik yang sehat dan menyediakan *public services* yang efektif dan akuntabilitas (Grey, 2007), Hal ini meningkatkan efektifitas penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terjadi adanya ketidak sinkronan antara indikator *good governance* dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN periode tahun 2007-2017. Maka yang akan dianalisis dalam pembahasan ini adalah seperti apa peran pelaksanaan *good governance* dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Didasari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian yang dapat ditemukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh *political stability and absence of violence* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?
4. Bagaimana pengaruh *voice and accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 negara ASEAN secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *government effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.

2. Menganalisis pengaruh *political stability and absence of violence* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.
3. Menganalisis pengaruh *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.
4. Menganalisis pengaruh *voice and accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama periode 2007-2017.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
2. Diharapkan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun daerah di negara-negara ASEAN guna menetapkan kebijakan publik dan membangun kualitas tata pemerintahan yang baik.

**BAB 2**  
**TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

**2.1. Tinjauan Pustaka**

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1	(Gaol , 2016)	Pengaruh <i>Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Good governance</i> yang diukur menggunakan indikator <i>control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability</i></li> </ul>	Panel data dengan Fixed Effect Model (FEM)	<i>Good governance</i> dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur anggaran. Desentralisasi fiskal dan struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap <i>good governance</i> . Desentralisasi fiskal, struktur

					anggaran dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	(Wibowo , 2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption</i></li> </ul>	Data panel	<i>Government effectiveness</i> dan <i>rule of law</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	(Alam, 2017)	<i>Government Effectiveness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Government Effectiveness</li> </ul>	<i>System Generalized Method of Moments (System GMM).</i>	<i>Government effectiveness</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	(Kraay, 2005)	<i>Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Worldwide Governance Indicators (WGI)</li> <li>• <i>Voice and Accountability, Political Stability</i> dan Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang</li> </ul>		Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan, untuk keadaan

			menunjukkan bahwa tidak ada		yang lebih baik atau lebih buruk, dalam rata-rata global pemerintahan.
5.	(Putu Purbadhamaja, 2010)	Implikasi Desentralisasi Fiskal dan <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Struktur anggaran, pertumbuhan ekonomi, disparitas regional dan <i>good governance</i></li> </ul>	Partial Least Square (PLS)	<i>Good governance</i> dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur anggaran. Desentralisasi fiskal dan struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap <i>good governance</i> . Desentralisasi fiskal, struktur anggaran dan <i>good governance</i> berpengaruh

					signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
6.	(Gale & Samwick, 2016)	<i>Effects of Income Tax Changes on Economic Growth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pajak</li> </ul>		<p>Tidak semua perubahan pajak akan memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan windfall, dan menghindari defisit pembiayaan memiliki efek yang lebih baik pada jangka panjang ekonomi, namun menciptakan tradeoff antara ekuitas dan efisiensi.</p>
7.	(Huang, 2014)	<i>What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pajak</li> </ul>		<p>Kenaikan pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi sehingga pajak dapat berpengaruh negatif</p>

					terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
8.	(Dokmen, 2013)	<i>Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Environmental Tax</li> </ul>	Panel VAR Analysis	Dengan menggunakan model Panel <i>Vector Autoregressive</i> , menemukan tanggapan positif dan statistik yang signifikan terhadap shock pajak lingkungan
9.	(Bayar, 2016)	<i>Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Voice and accountability, political stability and the absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption</i></li> </ul>	Panel data	<i>Regulatory quality</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga <i>control of corruption</i> dan <i>rule of law</i> memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara <i>political stability</i> memiliki dampak negatif terhadap

					pertumbuhan ekonomi.
10.	(Ozsoy, 2016)	<i>Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• <i>Rule of law, fight against corruption, voice and accountability</i></li> </ul>	System Generalized Method of Moments (System GMM).	<i>Rule of law</i> merupakan dasar pembangunan sosioekonomi. Pencegahan korupsi dan kebebasan berekspresi, struktur kelembagaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Sukirno, 2008)

(Tambunan T. T., 2003), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, maka pertumbuhan ekonomi adalah penambahan

Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan nasional. Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tergolong besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi serta ditambah dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup besar pada awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dapat tercapai.

Menurut (Kuznet, 2004), pembangunan ekonomi adalah perubahan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik perannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja.

Tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, antara lain: (a) akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia; (b) pertumbuhan penduduk akan dapat memberikan kontribusi angkatan kerja dalam perekonomian; dan (c) kemajuan teknologi, perkembangan teknologi juga berperan penting dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pertambahan modal yang tidak disertai perkembangan teknologi membuat perkembangan ekonomi menjadi lebih rendah dan lambat (Todaro & Smith, 2003).

(Sameulson , Paul, Nordhaus, & Williams, 2001) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa dalam jangka panjang yang digambarkan

sebagai ekspansi output nasional dalam suatu negara karena dalam jangka panjang perhitungan PDB ada dua, yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan. Perhitungan PDB ada tiga metode, yaitu pendekatan dari segi produksi, pendekatan dari segi pendapatan, pendekatan dari segi pengeluaran.

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*).
2. Pertumbuhan penduduk.
3. Kemajuan teknologi.
4. Sistem kelembagaan.

Manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
- b. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sectoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau Lembaga internasional lainnya.

- c. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis. Khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal). (Dornbusch, 1994)

## 2.2.2. Teori Ekonomi Klasik

### 2.2.2.1. Teori Adam Smith

Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik yang pertama kali membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah (Smith, 1723), yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An inquiry the Nature and Causes of The wealth of Nation* (1776). Inti ajaran Adam Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi. Menurut Smith system ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai terjadi posisi *stationer* (*stationare state*). Posisi *stationer* terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan (Tarigan, 2005). Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang secara sistematis ada dua aspek:

#### A. Pertumbuhan Output total

##### 1. Sumber alam tersedia

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maya bagi pertumbuhan ekonomi, jika sumber daya belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk yang ada akan memegang peranan dalam pertumbuhan output.

## 2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk mempunyai peranan pasif proses pertumbuhan *output*. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat.

## 3. Stok barang modal

Stok barang modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perananya sangat penting dalam proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat pertumbuhan tergantung pada laju pertumbuhan stok modal terhadap tingkat output total secara langsung dan tidak langsung.

## B. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu adalah tingkat upah pada saat itu. Tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dariada tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat tingkat upah *subsiten* (tingkat upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari). Maka jumlah penduduk akan meningkat. Smith juga menanyakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu.

#### 2.2.2.2. Teori David Ricardo

Teori (Ricardo , 2010), peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkat produktivitas tenaga kerja artinya bisa memperlambat bekerjanya “*the law of dimishing return*” sehingga akan memperlambat penurunan tingkat hidup. Ricardo menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh bebrapa faktor, yaitu:

1. Sumber daya alam (dalam arti tanah).
2. Jumlah penduduk menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah.
3. Kemajuan teknologi selalu terjadi.
4. Sektor pertanian dominan.

Teori ini disebutkan bahwa dalam masyarakat ekonomi terdapat tiga golongan yaitu masyarakat kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali hasil pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Golongan buruh dikatakan bahwa golongan yang tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, sedangkan golongan tuan tanah adalah mereka yang hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas tanah yang disewakan.

### 2.2.2.3. Teori Solow-Swan

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu banyak mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya terbatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Teori Neo Klasik, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan (dalam kondisi *full employment*). Dengan demikian, pertumbuhan yang baik membutuhkan syarat bahwa:

$$MPKI = \alpha_1 \frac{y_1}{k_1}$$

Dimana:

Suatu daerah akan mengimpor barang modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestic terhadap modal. Dalam pasar sempurna *Marginal Productivity of Labour* (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari *Marginal Productivity of Capital* (MPK). Hal ini bisa dilihat dari rasio modal tenaga kerja (K/L), apabila tiap daerah misalkan menghasilkan output yang homogen dan fungsi produksi yang identic maka di daerah yang K/L-nya rendah terdapat upah rill yang rendah tetapi MPK yang tinggi. Akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upah tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang lebih tinggi. Mekanisme diatas

pada akhirnya akan menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah sama, dengan demikian perekonomian regional pendapatan perkapita regional akan mengalami proses konvergensi (Tarigan, 2005).

### 2.2.2. *Good Governance*

Menurut UNESCAP dalam *good governance* memiliki 8 karakteristik utama, yaitu partisipatif, berorientasi consensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum, guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.

Menurut BAPPENAS pemerintah dalam arti paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki *mandate* yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (Lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu Lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan *governance* memiliki arti yang lebih kompleks dibanding *government* karena menyangkut pilar-pilar *good governance* itu sendiri.

Pengertian tersebut sesuai dengan yang menyatakan bahwa governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. World Bank dalam memberikan definisi governance sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, United Nation development Program (UNDP) dalam (Osborne, 2008) mendefinisikan governance sebagai “*the exercise of political economic, and administrative authority of manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan suara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy strategy formulation). *Economic Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor public adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

### 2.2.3.1. Pilar-Pilar *Good Governance*

Ada tiga pilar dalam good governance yaitu negara / pemerintah (Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (*corporate governance*) dan masyarakat madani (*civil society*) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Negara
  - a) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
  - b) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
  - c) Menyediakan public services yang efektif dan accountable
  - d) Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
  - e) Melindungi lingkungan hidup
  - f) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public
2. Swasta
  - a) Menjalankan industri
  - b) Menciptakan lapangan pekerjaan
  - c) Menyediakan insentif bagi karyawan
  - d) Meningkatkan standar hidup masyarakat
  - e) Memelihara lingkungan hidup
  - f) Mentaati peraturan
  - g) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat

h) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (Usaha kegiatan Mikro)

3. Masyarakat madani

- a) Menjaga hak-hak masyarakat terlindungi
- b) Mempengaruhi kebijakan public
- c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Upaya mewujudkan *good governance* hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar tersebut. Disamping itu jika ada pembaruan pada salah satu pilar maka harus diimbangi dengan pembaruan pada pilar-pilar lain. Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling control (checks and balances) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen lainnya. Apabila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam ketiga pilar tersebut maka akan terjadi proses yang sinergis dan konstruktif antar ketiganya sehingga secara umum sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

**2.2.3.2. Prinsip-prinsip *Good Governance***

Menurut Bappenas ada empat belas nilai yang menjadi prinsip good governance yaitu :

1. Wawasan ke depan (*Visionary*)

Semua kegiatan pemerintah berupa pelayanan publik dan pembangunan diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian/lembaga/satuan Kerja perangkat daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.

3. Partisipasi masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.

#### 4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

#### 5. Supermasi Hukum (*Rule of law*)

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum,

penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

#### 6. Demokrasi (*Democracy*)

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh Lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada consensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.

#### 7. Profesionalisme dan kompetensi (*Professionalism and Competency*)

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperlihatkan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme apratur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya mausia melalui Pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.

#### 8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau

kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya.

9. Efisien dan efektif (*Efficiency and Effectiveness*)

Pemerintahan harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkat yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga daya yang ada dapat digunakan secara proporsional.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor

swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang rill (demand driven) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Comitment to Reduce Inequality*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

13. Komitmen pada Lingkungan hidup (*Commitment to Enviromental Protection*)

Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.

Pemerintahan harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja

dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang komperatif.

### 2.2.3.3. Karakteristik Good Governance

#### a. *Government effectiveness*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin, berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

Mencerminkan persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Menurut MCC (miliennium Challenge Corporation) indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kompetisi pegawai negeri, implementasi keputusan pemerintah yang efektif, dan kerentanan pelayanan publik terhadap tekanan politik.

2. Kemampuan untuk mengelola politik tanpa perubahan kebijakan atau interupsi yang drastis dalam pelayanan pemerintah.
3. Fleksibilitas, pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik, kemampuan untuk mengkoordinasikan tujuan yang bertentangan menjadi kebijakan yang koheren.
4. Efisiensi mobilisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran
5. Kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik, penyediaan layanan kesehatan masyarakat, dan sekolah sebagai ketersediaan layanan pemerintah online.
6. Konsistensi kebijakan sejauh mana komitmen pemerintah dihormati oleh pemerintah baru.
7. Prevalensi birokrasi sejauh mana penundaan birokrasi menghambat aktivitas bisnis.
8. Adanya layanan informasi dan pembayaran pajak dan mekanisme banding yang efisien dan efektif.

*b. Political stability and absence voilance*

Indikator ini mengukur kemungkinan pemerintah akan stabil atau akan adanya penggulingan dengan cara yang inkonstitusional atau dengan kekerasan. Indikator berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, terorisme, pembunuhan politik (*political assassination*), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA.

*c. Regulatory quality*

Indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dan regulasi yang mengizinkan dan memajukan perkembangan sektor swasta. Indikator ini mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur aspek-aspek seperti control terhadap harga dan upah, aturan investasi asing, regulasi perbankan, regulasi ekspor impor, pembatasan usaha, dan kebijakan persaingan usaha.

Yaitu kualitas regulasi persepsi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik mengizinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta, menurut OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*), kualitas sistem peraturan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana caranya peraturan disusun dan dibuat. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa peraturan mereka beroperasi secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan dan standar lingkungan.

Menurut MCC (*Miliennium Challenge Corporation*) indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Prevelensi peraturan dan persyaratan administratif yang memberatkan bisnis, kemudahan memulai dan menutup bisnis baru kemudahan mendaftarkan *property*.
2. Intervensi pemerintah dalam ekonomi, sejauh mana subsidi pemerintah membuat industri yang tidak kompetitif hidup.

3. Kebijakan pasar tenaga kerja, undang-undang ketenagakerjaan memberikan keleluasaan dalam memperkerjakan dan pemecatan control upah dan harga.
4. Kompleksitas dan efisiensi sistem perpajakan, kebijakan pajak proinvestasi.
5. Kebijakan perdagangan, ketinggian hambatan tarif, jumlah band tarif, stabilitas tarif, sejauh mana hambatan non-tarif digunakan, transparansi dan prediktabilitas rezim perdagangan.
6. Daya tarik investasi, prevelensi larangan atau persyaratan perizinan investasi, peraturan keuangan tentang investasi dan modal asing, pembatasan legas atas kepemilikan bisnis dan ekuitas oleh bukan penduduk, peraturan mata uang asing, ketidakpastian umum tentang biaya regulasi, peraturan hukum lembaga keuangan, sejauh mana kebijakan nilai tukar menghambat daya saing perusahaan.
7. Kelengkapan antara hukum dan efektifitas peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan sekuritas, biaya peraturan, undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak pasti
8. Kekuatan sistem perbankan , adanya hambatan memasuki sektor perbankan, kemudahan akses ke pasar modal, perlindungan bank domestik dari persaingan asing, apakah suku bunga sangat diatur, biaya transfer yang terkait dengan modal ekspor

9. Partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur, dominasi perusahaan milik negara, keterbukaan kontrak sektor publik terhadap investor asing, tingkat persaingan pasar, efektivitas kebijakan dan undang-undang pesaingat dan anti-*trust*
10. Adanya kerangka kebijakan hukum dan kelembangaan yang mendukung pengembangan sektor keuangan perdesaan berbasis pasar yang efisien, adil dan dapat diakses oleh penduduk berpendapatan rendah di daerah perdesaan
11. Penerapan kerangka kebijakan, hukum dan peraturan yang tepat untuk mendukung kemunculan dan pengembangan sektor usaha pedesaan swasta yang efisien, penetapan prosedur sederhana, cepat dan transparan untuk membangun usaha agribisnis swasta
12. Adanya kerangka hukum dan kelembangaan yang mendukung pengembangan dan liberalisasi pasar pertanian berbasis komersial (untuk input dan produksi) yang beroperasi secara liberal dan sectoral, efisien secara fungsional dan adil, dapat diakses untuk petani kecil

*d. Voice and accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholder, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan

yang dibuat, apakah keputusan untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam sektor publik, yang juga termasuk birokrasi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

#### **2.2.3.4. Ciri-Ciri *Good Governance***

Menurut (Ida, 2002), ciri-ciri *Good Governance* sebagai berikut:

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.

5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat koordinasi yang fasilitasi.

#### **2.2.3.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*)**

Model tata kelola (*governance model*) pemerintah dicirikan oleh perubahan dalam peran pemerintah dari satu-satunya “pemain” menjadi satu dari banyak “pemain”. Tata kelola pemerintahan (*governance*) ditandai dengan perubahan peran pemerintah di masyarakat, dimana aktor non pemerintah, seperti warga negara dan LSM, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan prinsi-prinsip demokrasi diaplikasikan dengan memberikan masyarakat hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan .

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan. Organisasi internasional menganggap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi perkembangan ekonomi dan upaya melawan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan adopsi prinsip-prinsip demokratis oleh pemerintah, seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan

diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain. Institusi keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, serta negara donor, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai standar untuk mengevaluasi sistem dan urusan penerima donor. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah bantuan akan diberikan kepada negara tersebut atau tidak.

Suatu indeks dapat dibuat untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) dengan memfokuskan kepada satu atau dua aspek dari proses pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) misalnya, yang hanya mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Arnadt dan Oman (2006), berpendapat bahwa meskipun indeks tata kelola pemerintahan (*governance*) yang sempurna tidak akan pernah ada, beberapa indeks memiliki validitas dan kredibilitas lebih dibandingkan dengan indeks lain. Jumlah sumber yang digunakan untuk membangun sebuah indeks, kelengkapan proses pemerintahan yang dicakup, serta akurasi hasilnya merupakan faktor-faktor yang membuat sebuah indeks menjadi lebih kredibel dibandingkan indeks lainnya.

Dalam tataran implementatif guna mewujudkan *good governance* maka diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu yang sering disebut sebagai pengukuran *Indeks Good Governance* (IGG). Pengukuran

mengenai indeks sebagai pengukuran tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator yang digunakan dalam survei mencakup isu-isu *governance* :

1. Akuntabilitas
2. Partisipasi
3. Penegakan hukum
4. Keadilan
5. Responsivitas
6. Politisi
7. Tingkat KKN
8. Kualitas layanan publik

Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran Indeks *Good Governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional). GDS melakukan pengukuran IGG untuk tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan dari indeks tata kelola pemerintahan yaitu, menciptakan *World Governance Index* (WGI) yang memberikan gambaran keseluruhan tata kelola dunia pada saat berdasarkan data yang diperoleh untuk 179 negara yang termasuk

dama survei. WGI menggabungkan 5 indikator, masing-masing terdiri dari 13 sub-indikator, masing-masing terdiri dari 37 indeks. Indeks ini dipilih dari database terbaik yang tersedia, semuanya disediakan oleh sumber daya yang dikenal dengan

**Tabel 1. 6 World Governance Index**

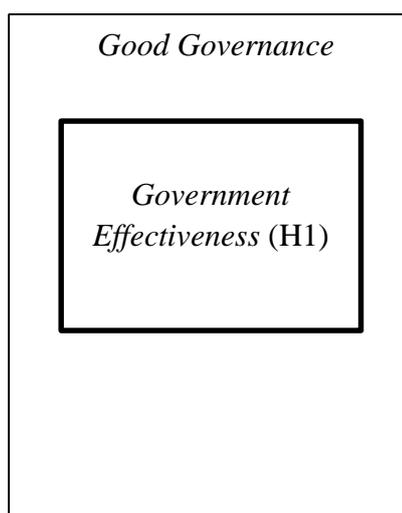
Indikator	Sub-Indikator	Indeks
<i>Rule of Law</i>	Badan hukum	Ratifikasi Internasional perjanjian perlindungan hak milik
	Sistem yang legal	Kemerdekaan efektivitas penyelesaian sengketa kontrak
	Korupsi	Indeks persepsi korupsi
Hak Asasi Manusia/Partisipasi	Hak sipil dan politik	Menghormati hak-hak sipil menghormati hak integritas fisik Kebebasan pers kekerasan terhadap pers
	Partisipasi	Partisipasi dalam kehidupan politik proses pemilihan dan pluralism budaya politik

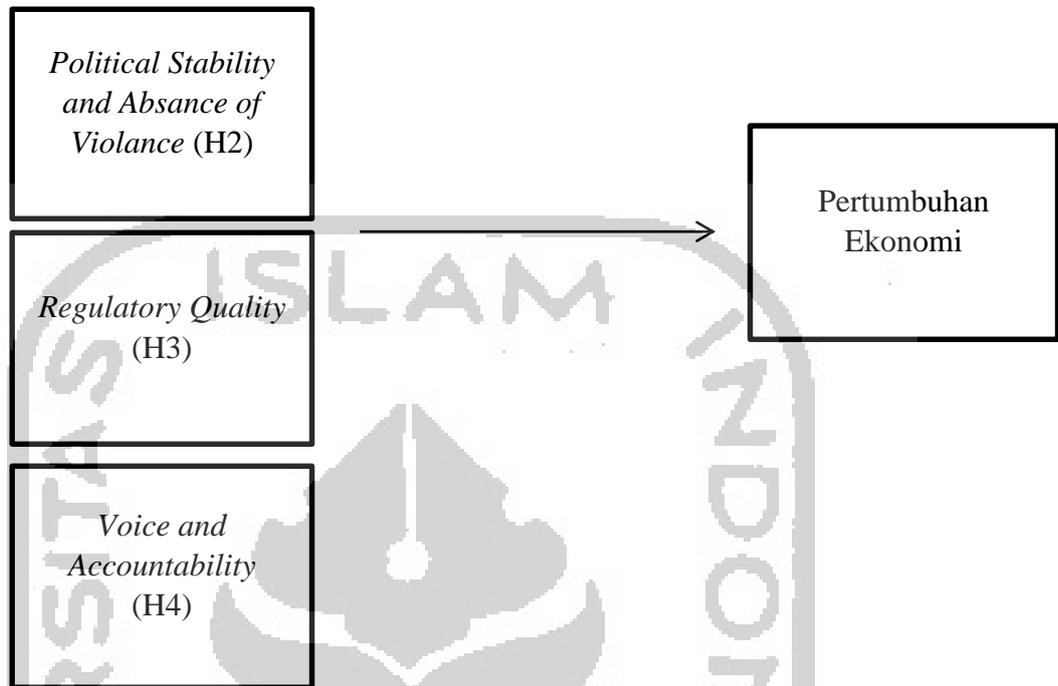
Pembangunan Berkelanjutan	Sektor ekonomi	GDP per kapita tingkat pertumbuhan GDP tingkat Inflasi kemudahan dalam memulai bisnis
Pengembangan Manusia	Pembangunan	Pembangunan manusia
	Kesejahteraan/Kebahagiaan	Kesejahteraan subjektif kebahagiaan

kualitas, keseriusan dan keandalannya, Memotivasi aktor-aktor tata kelola dunia untuk mempertimbangkan WGI yang dihasilkan dan kepentingan relatif dari berbagai indikator. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi indikator “kunci” atau “pilot” yang akan menyiapkan kondisi untuk tata kelola dunia yang baik dan yang lebih penting, menjamin keberjakutannya. Atas dasar situasi yang digambarkan oleh WGI dan diagnosis nya, seharusnya memungkinkan actor yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mempertimbangkan solusi.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability*.





#### 2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga *Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017.
2. Diduga *Regulatory Quality* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017

3. Diduga *Political Stability and Absance of Voilance* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017
4. Diduga *Voice and Accountability* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *Worldwide Governance Indicator* dari Bank Dunia, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder. Data akan diolah menggunakan Teknik data panel yang merupakan kombinasi dari *data time series* dan *cross section*. Data cross section dalam penelitian ini adalah data negara ASEAN dengan *time series* periode 2007 sampai 2017. Data masing-masing variabel didapat dari *World Bank*.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Variabel-variabel pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, *government effectiveness*, *political stability and absence of violence*, *regulatory quality* dan *voice and accountability* sebagai variabel independent.

##### **3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Diukur dengan menggunakan persen (Riyadi,2012).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

$$\text{PDRBt-1} \times 100 \%$$

Keterangan : PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t P

DRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto satu tahun sebelum tahun t

### **Indikator Tata Kelola Pemerintahan (*World Governance Indicators*)**

Menurut Kaufmann et al dalam Huynh dan Jacho-Chavez (2009), *World Governance Indicators* (WGI) yang disediakan oleh World Bank mengukur data kelola pemerintahan yang baik yaitu:

- a. *Government Effectiveness* (X1) adalah ukuran kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Diukur dengan menggunakan indeks.
- b. *Political Stability and Absence of Violence* (X2) adalah ukuran kemungkinan perubahan dalam kekuasaan yang dapat berdampak bukan hanya kepada keberlanjutan kebijakan tetapi juga mengurangi warga negara untuk memilih dan mengganti penguasa dengan damai, diukur dengan menggunakan indeks.
- c. *Regulatory Quality* (X3) yaitu ukuran kemampuan pemerintahan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta. Diukur dengan menggunakan indeks.

- d. *Voice and Accountability* (X4) yaitu mengukur berbagai aspek dari proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik masyarakat, diukur dengan menggunakan indeks.

### 3.3. Model Analisis

#### 3.3.1. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan *cross section* dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut *Ordinary Least Square (OLS)*. Regresi Data Panel adalah gabungan antara *cross section* dan *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda.

Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ( $t=1,2,\dots,T$ ) dan N jumlah individu ( $I = 1,2,\dots,N$ ), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel*. Sedangkan jenis data yang lain, yaitu: data *time-series* dan data *cross-section*. Pada data *time series*, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross-section* merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

### 3.3.1.3. Asumsi Regresi Data Panel

Metode Regresi Data Panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)* jika semua asumsi *Gauss Markov* terpenuhi diantaranya adalah non-autocorrelation inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel. Sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model *time series* seperti *fungsi transfer*, maka ada informasi keragaman dari unit *cross section* yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit *cross section*.

### 3.3.2. Estimasi Regresi Data Panel

Pengujian hipotesis estimasi dalam penelitian ini meliputi pengujian secara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect :

#### 3.3.2.1. Metode *Common Effect* atau *Pooled Least Square (PLS)*

Pendekatan *Pooled Least Square* ini menggunakan Metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling Sederhana yang memiliki intersep dan *Slope* yang konstan. Model *Pooled Least Square* dapat didefinisikan ke dalam model berikut:

Dimana  $i$  merupakan negara yang diobservasi pada data *cross-section*, merupakan periode pada data *time-series*. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena diasumsikan intersep dan slope dari setiap variabel dinyatakan konstan untuk setiap negara yang diobservasi.

### 3.3.2.2. Metode *Fixed Effect* (FEM)

Pada metode *Fixed Effect Model*, intersep dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepnya dapat digunakan perubah *dummy*, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Dimana  $\beta_{0i}$  merupakan intersep dan  $\beta_1, \beta_2$  merupakan *slope*. Adanya perbedaan intersep pada setiap unit cross section dilakukan dengan penambahan subscript *i*. meskipun intersep berbeda antar negara namun intersep masing-masing negara tidak berbeda antar waktu, yang disebut *time invariant*.

### 3.3.2.3. Metode *Random Effect* (REM)

Pendekatan *Random effect Model*, intersep tidak lagi dianggap konstan, melainkan dianggap sebagai perubah random. Nilai intersep dari masing-masing individu dapat dinyatakan sebagai. Keuntungan dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau Teknik *Generalized Least Square* (GLS).

### 3.3.3. Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu dapat digunakan *chow test* dan *hausman test*. Dimana *chow test* digunakan untuk menguji kesesuaian data yang didapat dari *pooled least square* dan data yang didapatkan dari metode *fixed effect*. Kemudian dilakukan *hausman test* untuk dipilih model paling tepat yang diperoleh dari hasil *chow test* dan metode *random effect*.

### 3.3.3.1. Chow Test

*Chow Test* yakni pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat di gunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

$H_0$  : *Common Effect Model* atau pooled OLS

$H_1$  : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar ( $>$ ) dari F tabel maka  $H_0$  ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil ( $<$ ) dari F tabel maka ( $<$ ) diterima dan model yang digunakan adalah *Common effect Model* (Widarjono, 2010)

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus

$$F = \frac{\frac{(SSE_1 - SSE_2)}{(n - 1)}}{\frac{SSE_2}{(nt - n - k)}}$$

Dimana:

$SSE_1$  = Sum Square Error dari model *Common Effect*

$SSE_2$  = Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

$n$  = Jumlah perusahaan (*cross section*)

$nt$  = Jumlah *cross section* x jumlah *time series*

$k$  = Jumlah variabel independen

### 3.3.3.2. Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012) *Hausman test* menggunakan program yang serupa dengan *Chow test* yaitu program *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Hausman test* adalah sebagai berikut

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_1$  : Model *Fixed Effect*

Ketika  $H_0$  ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ . Sebaliknya,  $H_0$  diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang digunakan sebesar 5%.

$$t = \beta_n / S\beta_n$$

Dimana:

$t$  = mengikuti fungsi  $t$  dengan derajat kebebasan ( $df$ ).

$\beta_n$  = koefisien regresi masing-masing variabel.

$S\beta_n$  = standar error masing-masing variabel.

Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$  ( $\alpha$ ) atau  $T$  hitung  $< T$  tabel berarti hipotesa tidak terbukti maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, bila dilakukan uji secara parsial.

- b. Jika probabilitas (signifikansi)  $< 0,05$  ( $\alpha$ ) atau  $T$  hitung  $> T$  tabel berarti hipotesa terbukti maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, bila dilakukan uji secara parsial.

### 3.3.4. Uji Analisis Statistik

Di dalam Uji Analisis Statistik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikan secara statistik dan kebaikan sesuai dengan (*goodnes of fit*) variabel-variabel yang akan diteliti. Dengan demikian maka akan dijelaskan melalui Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji F simultan, dan Uji t-statistik dari hasil estimasi.

#### 3.3.4.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Hasil perhitungan *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada output *Model Summary*. Pada kolom *Adjusted R<sup>2</sup>* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Di mana :

$R^2$  = Koefisien determinasi

ESS = *Explained Sum Squeared* (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

TSS = *Total Sum Squear* (jumlah total kuadrat)

### 3.3.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara Bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0.01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%).

Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas variabel berikut:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1-R^2)(n-k-1)}$$

Keterangan

$R^2$  = koefisien regresi

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

### 3.3.4.3. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel depend. Cara mendeteksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan melihat tabel coefficients dapat dilihat dari koefisien regresi dan hubungan antara variabel tersebut. Jika tanda negatif maka variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen dan jika tidak ada tanda negatif maka variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Hipotesis akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: Berpengaruh

H<sub>1</sub>: Tidak Berpengaruh

Keterangan:

1. Jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05$ , maka hipotesis ( $\alpha$ ) atau F hitung  $< F$  tabel berarti hipotesis tidak terbukti maka H<sub>0</sub> diterima Ha ditolak bila dilakukan secara simultan. ditolak maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.
2. Jika nilai dari (signifikansi)  $< 0,05$ , ( $\alpha$ ) atau F hitung  $> F$  tabel hipotesis terbukti maka H<sub>0</sub> ditolak dan Ha diterima bila dilakukan secara simultan.

## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data Penelitian**

Pada analisis dan pembahasan ini akan menguraikan penelitian mengenai pengaruh dari indeks adalah *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* 5 negara ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand dari tahun 2007 sampai 2017. Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada jumlah data *Cross Section* dan *data panel*. Analisis data panel dilakukan dengan melakukan pemilihan metode analisis data panel tersebut, akan dipilih salah satu metode yang selanjutnya akan digunakan untuk tahap uji statistic.

Dalam analisis ini akan menggambarkan data-data hasil penelitian sehubungan dengan penggunaan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari *World Bank*. Data tersebut adalah indeks adalah *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* 5 negara ASEAN terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 sampai 2017. Berikut hasil deskripsi dari data variabel penelitian.

**Tabel 1. 7 Statistik Deskriptif**

	GE	PE	PSAV	RQ	VA
Mean	0.730543	3.654145	0.151502	0.64107	-0.38768
Median	0.897023	4.22	0.136825	0.588943	-0.40032
Maximum	2.436975	15.24	1.585588	1.825278	0.184837
Minimum	-0.49339	-2.466	-1.44279	-0.41586	-1.06154
Std. Dev.	0.957584	3.318467	0.999388	0.688005	0.346738
Skewness	0.307245	0.291074	-0.08379	0.288339	-0.24369
Kurtosis	1.855627	4.308291	1.48459	1.987372	2.254395
Jarque-Bera	3.866475	4.699112	5.327093	3.112024	1.818378
Probability	0.144679	0.095411	0.069701	0.210976	0.402851
Sum	40.17988	200.978	8.332611	35.25885	-21.3226
Sum Sq. Dev.	49.51618	594.6599	53.93397	25.56094	6.492261
Observations	55	55	55	55	55

Sumber : Data di olah

Analisis statistic deskriptif pada tabel diatas menunjukkan jumlah obeservasi sebanyak 55 dari 5 negara ASEAN selama periode penelitian 2007-2017. Pada tabel 4.1 dapat dinyatakan bahwa selama periode penelitian diperoleh rata-rata tingkat *Government Effectiveness* sebesar 0.730543% sedangkan *Government Effectiveness* tertinggi sebesar 2,43% dan *Government Effectiveness* terendah sebesar -0,49%, Selanjutnya pada variabel *political stability and absence of violence* tertinggi sebesar 1,58% dan *political stability and absence of violence* terendah -1,44%. *regulatory quality* tertinggi 1,82% sedangkan *regulatory quality* terendah -0.41% dan *voice and accountability* tertinggi 0,81% sedangkan terendah *voice and accountability* -1.06%

## 4.2. Hasil dan Analisis

### 4.2.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect* ataukah *Fixed effect*.

H0 : Memilih model Common Effect, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada  $\alpha 5\%$ .

H1 : Memilih model Fixed effect, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada  $\alpha 5\%$ .

**Tabel 1. 8 Uji chow dengan Redundant Test**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.231263	(4,46)	0.3108
Cross-section Chi-square	5.594246	4	0.2316

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* dengan *Redundant Test* diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 0.2316 karena semua model pengujian memiliki nilai probabilitas chi-square lebih kecil dari alpha 0,05 maka model menggunakan *fixed effect model*.

Dari hasil penelitian di atas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* yang akan membandingkan dengan model *fixed effect* dengan menggunakan uji *Hausman Test*.

#### 4.2.1.1 Uji Hausman

uji hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*

H0 : Memilih model *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada  $\alpha$  5%

H1 : Memilih model *Fixed Effect*, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada  $\alpha$  5%.

**Tabel 1. 9 Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.925051	4	0.2951

Uji Hausman ini menggunakan distribusi chi-square, bila nilai hitung lebih besar dari nilai tabelnya maka model yang digunakan adalah model estimasi *fixed effect*, sebaliknya bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel maka model yang digunakan adalah *random effect*. Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *chi-square* tidak signifikan sebesar 0.2951 yang lebih besar dari  $\alpha$  0,05 ( $0.2951 > 0,05$ ), maka model yang tepat adalah *random effect model*. Dengan demikian berdasarkan uji Hausman model yang tepat untuk menganalisis pengaruh Good governance terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *random effect model* dari pada *fixed effect model*. Selain itu model ini juga

menjelaskan kemungkinan adanya korelasi antara lima negara tujuan dan rentan waktu yang dipilih.

Setelah melakukan uji F dan uji hausman maka dalam penelitian ini menggunakan *random effect model*.

#### 4.2.3. Model Regresi Panel Fixed Effect

**Tabel 1. 10 Model Random Effect**

Dependent Variable: PE  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/11/19 Time: 22:08  
 Sample: 2007 2017  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.399196	0.907100	3.747324	0.0005
GE	3.141856	1.234109	2.545851	0.0140
RQ	-0.732943	1.432349	-0.511707	0.6111
PSAV	-2.962827	0.885822	-3.344719	0.0016
VA	2.893011	1.211922	2.387127	0.0208
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			2.698054	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Adjusted R-squared	0.326732	S.D. dependent var		3.318467
S.E. of regression	2.722898	Sum squared resid		370.7088
F-statistic	7.551449	Durbin-Watson stat		2.350970
Prob(F-statistic)	0.000077			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Sum squared resid	370.7088	Durbin-Watson stat		2.350970

Model regresi berganda *Random Effect* pada tingkat ketimpangan pendapatan:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 GE_{it} + \beta_2 RQ_{it} + \beta_3 PSAV_{it} + \beta_4 VA_{it} + \mu_{it}$$

$$PE = 3.399196 PE_{it} + 3.141856 GE_{it} - 0.73294 RQ_{it} - 2.96282 PSAV_{it} + 2.893011 VA_{it} + \mu$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

GE = *Government Effectiveness* (satuan persen)

RQ = *Regulator Quality* (satuan persen)

PSAV = *political stability and absence of violence* (satuan persen)

VA = *voice and accountability* (satuan persen)

$\beta$  = Kostanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi Berganda

$\mu$  = Variabel Pengganggu

Dari tabel regresi model *Random effect* diatas dapat dilihat ketimpangan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.399196 persen dengan asumsi variabel independen (GE, VA, RQ, PSAV) lainnya tidak ada.

- a. *Government Effectiveness* naik 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3.141856 persen.
- b. *Voice and Accountability* naik 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.893011 persen.
- c. *Regulator Quality* naik 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.732943 persen.

- d. *political stability and absence of violence* naik 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar -2.962827 persen.

#### 4.2.4. Hasil Uji Analisis Statistik

##### 4.2.4.1. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui R Square adalah 0.3766040, hal ini dapat di artikan bahwa 37,6 % variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya 62,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.1 1 Hasil Koefisien Determinasi**

Variabel	Adjusted R Square
<i>Government Effectiveness</i>	0.326732
<i>voice and accountability</i>	
<i>Regulator Quality</i>	
<i>political stability and absence of violence</i>	

#### 4.2.4.2 Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah secara variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada tabel *Random Effect* di atas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidak nya pengaruh *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* dengan membandingkan probabilitas F dengan alpha 0,05 maka dapat diketahui tidaknya pengaruh variabel *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* secara bersama terhadap pertumbuhan ekonomi

**Tabel 1.1 2 Hasil Uji F**

Variabel	Probabilitas F
<i>Government Effectiveness</i>	
<i>voice and accountability</i>	0.000077
<i>Regulator Quality</i>	
<i>political stability and absence of violence</i>	

Hasil perhitungan pada *random effect model*, diperoleh model F sebesar 0.000077 yang lebih kecil dari alpha 0,05 (  $0.000077 < 0,05$  ), maka dapat dinyatakan *government effectiveness, political stability and absence of violence,*

*regulatory quality dan voice and accountability* secara bersama-sama signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

#### 4.2.4.3 Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat, hasil uji t dapat di lihat pada tabel model *Random Effect*, uji hipotesis ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN, dengan membandingkan probabilitas 0,05 maka dapat diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis.

**Tabel 1.1 3 Hasil Uji T**

Variabel Independen	Coeffisient	Probabilitas
C	3.399196	0.0005
GE	3.141856	0.0140
RQ	-0.732943	0.6111
PSAV	-2.962827	0.0016
VA	2.893011	0.0208

1. Pengaruh *Government Effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil perhitungan pada model *Random Effect*, variabel *Government Effectiveness* memiliki nilai koefisien 3.141856 dan memiliki nilai probabilitas 0.0140 yang kurang dari alpha 0.05

( $0.014 < 0.05$ ), maka dapat dinyatakan *Government Effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh *Regulatory Quality* terhadap pertumbuhan ekonomi hasil perhitungan pada model *Random Effect*, variabel *Regulatory Quality* memiliki koefisien regresi sebesar  $-0.732943$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.6111$  yang lebih dari alpha  $0.05$  ( $0.611 > 0.05$ ), maka dinyatakan *Regulatory Quality* berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh *Political Stability and Absance of Violence* terhadap pertumbuhan ekonomi hasil perhitungan pada model *Random effect*, variabel *Political Stability and Absance of Violence* memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-2962827$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0016$  yang kurang dari alpha  $0.005$  ( $0.0016 < 0.05$ ), maka dapat dinyatakan *Political Stability and Absance of Violence* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh *Voice and Accountability* terhadap pertumbuhan ekonomi hasil perhitungan pada model *Random Effect*, variabel *Voice and Accountability* memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $2.893011$  dan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0208$  yang kurang dari alpha  $0.05$  ( $0.0208 < 0.05$ ), maka dapat dinyatakan *Voice and Accountability* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 4.2.3 Interpretasi Data

Pada interpretasi akan dijelaskan hubungan antara masing-masing variabel independen (*government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability*) dengan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Berikut hubungan yang dapat dijelaskan melalui hasil *Random Effect Model (REM)*:

Koefisien konstanta sebesar 3.399196 maka konstanta berpengaruh positif. Artinya *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* sebesar nol, maka pertumbuhan ekonomi 3.399196.

Koefisien *government effectiveness* sebesar 3.141856, maka *government effectiveness* berhubungan positif. Artinya ketika *government effectiveness* naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 3.141856, dengan asumsi variabel lain tetap. Begitu pula sebaliknya, jika *government effectiveness* turun 1% maka volume pertumbuhan ekonomi turun sebesar 3.141856. penjelasan diatas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesa yang telah dijelaskan, bahwa *government effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien *regulatory quality* sebesar -0732943 maka *regulatory quality* di lima negara berhubungan negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi akan turun -0732943, dengan asumsi variabel lain tetap. Begitu pula sebaliknya, jika *regulatory quality* di lima negara akan naik sebesar 1 % maka *regulatory quality* akan naik sebesar 0732943.

Koefisien *political stability and absence of violence* -2.962827 maka *political stability and absence of violence* di lima negara berhubungan negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi akan turun -2.962827, dengan asumsi variabel lain tetap. Begitu pula sebaliknya, jika *political stability and absence of violence* di lima negara akan naik sebesar 1% maka *regulatory quality* akan naik sebesar 2.962827.

Koefisien *voice and accountability* sebesar 2.893011, maka *voice and accountability* berhubungan positif. Artinya ketika *voice and accountability* naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 2.893011, dengan asumsi variabel lain tetap. Begitu pula sebaliknya, jika *voice and accountability* turun 1% maka volume pertumbuhan ekonomi turun sebesar 2.893011. penjelasan diatas menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesa yang telah dijelaskan, bahwa *voice and accountability* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal-hal yang telah dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Fathia, 2018), bahwa negara dengan indeks *government effectiveness* yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan dengan indeks yang rendah juga akan menghasilkan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang rendah dan negara dengan indeks *rule of law* yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan dengan indeks yang rendah juga akan menghasilkan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang rendah, negara dengan *voice and accountability* indeks yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah serta negara dengan indeks

political stability and absence voilance tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



## **BAB 5 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan alat analisis diperoleh beberapa hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian dan pembahasan tertuang dalam simpulan serta implikasi. Berikut kesimpulan dari penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi 5 negara sebagai berikut:

1. Model estimasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian adalah Random Effect Model untuk variabel dependen pertumbuhan ekonomi 5 negara. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.376604 artinya dari keempat variabel independent yaitu *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* mampu menjelaskan variabel dependen pertumbuhan ekonomi 5 negara ASEAN sebesar 37.6%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability* lebih mampu menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang ada di 5 negara ASEAN.
2. Variabel *Government Effectiveness* di lima negara ASEAN mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan.
3. Variabel *Regulator Quality* di lima negara ASEAN mempunyai hubungan positif dan tidak signifikan terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi negara tujuan.

4. Variabel *political stability and absence of violence* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi negara tujuan.
5. Variabel *voice and accountability* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi negara tujuan.

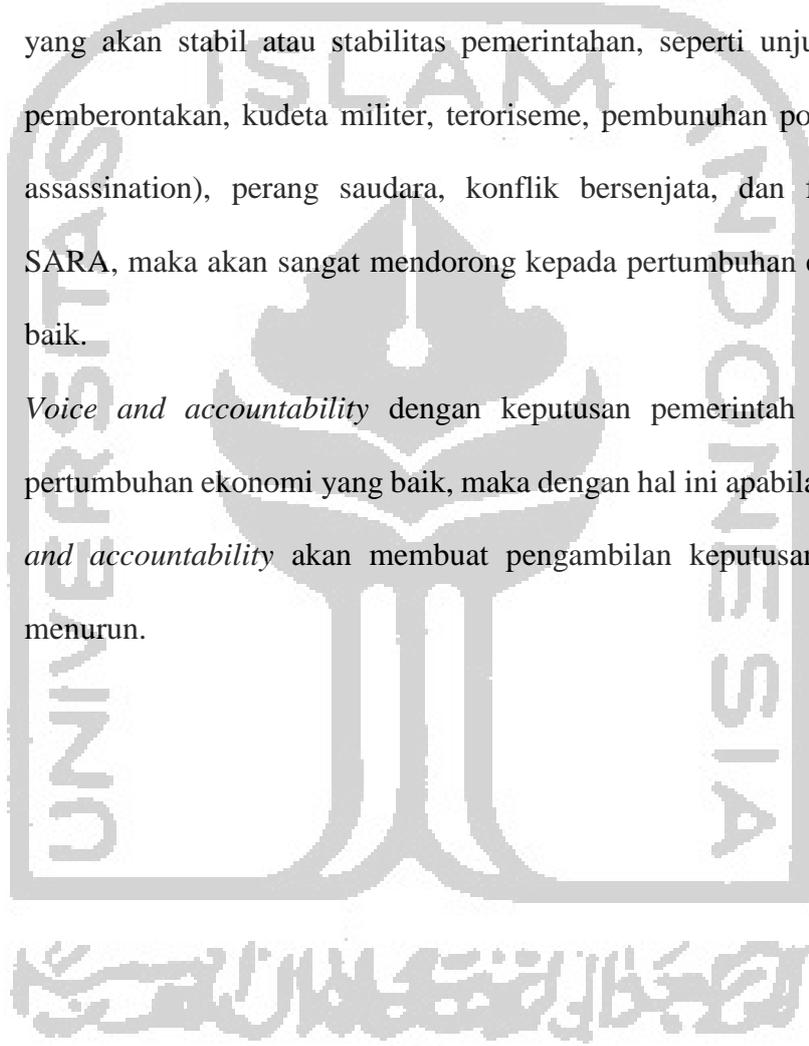
## 5.2. Implikasi

Dari kesimpulan yang telah di paparkan, didapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Dengan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN diharapkan pemerintah disetiap negara dan instansi terkait mampu menjaga dan mempertahankan pengaruh-pengaruh di setiap indikator yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada taraf yang stabil di setiap indikator yang ada.
2. *Government Effectiveness* merupakan patokan utama utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil, implementasi kebijakan serta komitmen pemerintah terhadap kebijakan, dengan setiap tahun nya di harapkan lembaga-lembaga yang ada dapat berjalan dengan jalur yang ada dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia.
3. *Regulator Quality* merupakan salah satu acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka aturan-aturan yang ada di setiap negara harus dilakukan dengan keadilan dan pemerintah dapat menjalankan sebuah

kebijakan yang sangat tepat guna, sehingga akan membantu mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi.

4. *Political stability and absence of violence* merupakan salah satu patokan utama untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana pemerintah yang akan stabil atau stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, terorisme, pembunuhan politik (political assassination), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA, maka akan sangat mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang baik.
5. *Voice and accountability* dengan keputusan pemerintah akan menuju pertumbuhan ekonomi yang baik, maka dengan hal ini apabila adanya *voice and accountability* akan membuat pengambilan keputusan yang buruk menurun.



## DAFTAR PUSTAKA

*ASEAN Matters For America*. (2013). Washington : East - West Center .

- Alam, M. R. (2017). *Government Effectiveness dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- Barro, R. J. (1996). *Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study*. MIT Press.
- Bayar, Y. (2016). *Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union*.
- Desi, P. K. (2015). *aruh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan pajak terhadap investasi asing langsung*. Peng.
- Dokmen, G. (2013). *Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis*.
- Dornbusch, R. (1994). *MAKROEKONOMI (Edisi Keempat)*. Jakarta: Erlangga.
- Evans. (1996). *Bureaucracy and growth : A Cross-National Analysis of the Effects of "Weberian" State Structures on Economics Growth*. 748-765.
- Fair, C. (2014). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Erlangga.
- Fathia, S. N. (2018). *Analysis Pengaruh Tata Kelola Yang Baik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*.
- Gale, W., & Samwick, A. (2016). *Effects of Income Tax Changes on Economic Growth*.
- Gaol, M. L. (2016). *Pengaruh Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*.
- Grey. (2007). *Teori Ekonomi Makro (Good Governance)*. Airlangga.
- Guan, D. X. (2009). *Growth Theory Needs an Institutional Structure*, 1-15.
- Gujarati. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Airlangga.
- Hasyim, A. I. (2008). *Ekonomi Makro*. Gramedia.
- Healey. (2009). *Tara Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance)*. Azeez.
- Huang, C. C. (2014). *What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?*
- Ida, L. O. (2002). *Tara Kelola Pemerintahan yang baik*. Jakarta.
- Jhingan. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Akademik Umum.
- Kaufman, Kraay, & Lobaton. (2011). *Good Governance and Human Development*.
- Kraay, A. (2005). *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*.
- Kurnianingrum. (2015). *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*.
- Kuznet. (2004). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Osborne, D. (2008). *Reveinting Government*. Washington DC: The Washington Post.
- Ozsoy, F. N. (2016). *Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?*

- Putu Purbadhamaja, I. B. (2010). *Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*.
- Raz, A. F. (2012). *Krisis Keuangan Global Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 1-20.
- Ricardo , D. (2010). *Teori Ekonomi Regional*.
- Sameulson , Paul, Nordhaus, & Williams. (2001). *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global .
- Sedarmayanti. (2013). *ISLAM Sumber Daya Manusia* . Bandung: Refika Aditama.
- Smith, A. (1723). *An inquiry the Nature and Causes of The wealth of Nation (1776)*. Chicago: University of Chicago Press UK.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*.
- sukirno, s. (2008). *makroekonomi pengantar* . Jakarta : rajawali pers.
- Sukirno, S. (2008). *Markoekonomi Teori Pengantar*. DKI Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, D. T. (2001). *Perekonomian Indonesia* . Ghalia Indonesia .
- Tambunan, T. T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional*. Jakarta Pusat: PESAN BUKU.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarata: Ghalia Indonesia .
- Tofaro. (2013). *Teori Pertumbuhan Neo Klasik*, 17.
- Wibowo , E. (2013). *Analysis Pengaruh Kualitas Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN*.
- Widarjono, A. (2010). *Teori Makroekonomi*. Rajawali Press.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

**Data pertumbuhan ekonomi 5 negara ASEAN, *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability***

Negara	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Government Effectiveness	Political Stability and Absence of Violence	Regulatory Quality	Voice and Accountability
Brunei Darussalam	2007	0.155	0.924397	1.106725	0.986214	-1.06154
Brunei Darussalam	2008	-1.94	0.888503	1.126965	0.783787	-1.01813
Brunei Darussalam	2009	-1.765	0.918072	1.387627	1.087068	-0.73072
Brunei Darussalam	2010	2.599	0.901894	1.277547	1.110249	-0.65057
Brunei Darussalam	2011	3.745	0.897023	1.085194	1.154296	-0.61034
Brunei Darussalam	2012	0.913	0.843525	0.909327	1.151749	-0.50637
Brunei Darussalam	2013	-2.126	0.869773	1.074022	1.105576	-0.50507
Brunei Darussalam	2014	-2.35	1.086335	1.261507	0.985129	-0.62503
Brunei Darussalam	2015	-0.567	1.060171	1.242662	0.852387	-0.75411
Brunei Darussalam	2016	-2.466	1.084499	1.154172	0.593397	-0.90102
Brunei Darussalam	2017	1	1.144513	1.189136	0.715464	-0.94841
Indonesia	2007	6.345	-0.2772	-1.1963	-0.34499	-0.0198
Indonesia	2008	6.014	-0.2372	-1.05838	-0.34829	-0.01126
Indonesia	2009	4.629	-0.29813	-0.75139	-0.3618	-0.00104
Indonesia	2010	6.224	-0.21431	-0.85392	-0.41586	-0.03777
Indonesia	2011	6.17	-0.25942	-0.77011	-0.35191	-0.00853
Indonesia	2012	6.03	-0.27291	-0.59326	-0.27876	0.067613
Indonesia	2013	5.557	-0.19875	-0.51926	-0.19544	0.036121
Indonesia	2014	5.007	-0.03721	-0.41682	-0.10766	0.153905
Indonesia	2015	4.876	-0.24053	-0.61506	-0.21756	0.184837
Indonesia	2016	5.033	0.007594	-0.37295	-0.12234	0.166669
Indonesia	2017	5.068	0.040761	-0.51181	-0.10632	0.129872
Malaysia	2007	6.299	1.238987	0.193773	0.506119	-0.52354

Malaysia	2008	4.832	1.108519	0.108325	0.316369	-0.56319
Malaysia	2009	-1.514	0.983706	-0.04238	0.303689	-0.5039
Malaysia	2010	7.425	1.120518	0.143352	0.588943	-0.49998
Malaysia	2011	5.294	1.021163	0.07741	0.582069	-0.47487
Malaysia	2012	5.473	0.919864	-0.00521	0.570484	-0.34654
Malaysia	2013	4.694	0.999807	0.051792	0.636703	-0.33968
Malaysia	2014	6.007	1.115127	0.266619	0.837721	-0.3603
Malaysia	2015	5.028	0.949164	0.258958	0.752673	-0.39146
Malaysia	2016	4.22	0.874762	0.136825	0.711795	-0.41835
Malaysia	2017	5.902	0.838083	0.160816	0.683503	-0.40032
Singapura	2007	9.112	2.375459	1.174122	1.612359	-0.36321
Singapura	2008	1.788	2.436975	1.345581	1.606087	-0.33484
Singapura	2009	-0.603	2.270797	1.179446	1.566005	-0.23422
Singapura	2010	15.24	2.241407	1.169415	1.625942	-0.20897
Singapura	2011	6.351	2.154786	1.191422	1.669992	-0.10203
Singapura	2012	4.083	2.166091	1.368175	1.731186	0.053091
Singapura	2013	5.111	2.088955	1.378178	1.705524	0.036768
Singapura	2014	3.884	2.182617	1.186271	1.824775	-0.09866
Singapura	2015	2.241	2.236756	1.311753	1.813492	-0.16182
Singapura	2016	2.397	2.191794	1.495759	1.825278	-0.15045
Singapura	2017	3.619	2.205368	1.585588	1.822819	-0.16934
Thailand	2007	5.435	-0.3695	-1.11144	0.142855	-0.5625
Thailand	2008	1.726	-0.40779	-1.27144	0.210525	-0.52967
Thailand	2009	-0.691	-0.30971	-1.42479	0.217966	-0.45588
Thailand	2010	7.514	-0.33386	-1.44279	0.173715	-0.49582
Thailand	2011	0.84	-0.32346	-1.13353	0.201636	-0.40518
Thailand	2012	7.243	-0.36616	-1.21663	0.243573	-0.32114
Thailand	2013	2.687	-0.34356	-1.31168	0.226504	-0.42993
Thailand	2014	0.984	-0.45027	-0.90639	0.273264	-0.87478
Thailand	2015	3.02	-0.49339	-0.99443	0.292019	-0.96906
Thailand	2016	3.283	-0.389	-0.98858	0.16807	-1.02507
Thailand	2017	3.903	-0.38552	-0.75731	0.140796	-1.04701

Ket :

Y : Pertumbuhan Ekonomi (%)

X1 : *Government Effectiveness* (%)

X2 : *Regulatory Quality* (%)

X3 : *Political Stability and Absence of Violence (%)*

X4 : *Voice and Accountability (%)*

### Lampiran 2

#### Common Effect Model

Dependent Variable: PE  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 02/11/19 Time: 22:00  
 Sample: 2007 2017  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.399196	0.915452	3.713133	0.0005
GE	3.141856	1.245472	2.522622	0.0149
RQ	-0.732943	1.445538	-0.507038	0.6144
VA	2.893011	1.223081	2.365347	0.0219
PSAV	-2.962827	0.893979	-3.314202	0.0017
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Adjusted R-squared	0.326732	S.D. dependent var		3.318467
S.E. of regression	2.722898	Akaike info criterion		4.927779
Sum squared resid	370.7088	Schwarz criterion		5.110264
Log likelihood	-130.5139	Hannan-Quinn criter.		4.998347
F-statistic	7.551449	Durbin-Watson stat		2.350970
Prob(F-statistic)	0.000077			

### Lampiran 3

#### Fixed effect Model

Dependent Variable: PE  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 02/11/19 Time: 22:02  
 Sample: 2007 2017  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.380769	4.776645	-0.289067	0.7738
GE	2.221217	3.994300	0.556097	0.5808
VA	-1.821216	2.793555	-0.651935	0.5177
RQ	5.109330	3.842245	1.329777	0.1901
PSAV	-3.757524	2.609215	-1.440097	0.1566

---

---

Effects Specification

---

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.436893	Mean dependent var	3.654145
Adjusted R-squared	0.338962	S.D. dependent var	3.318467
S.E. of regression	2.698054	Akaike info criterion	4.971520
Sum squared resid	334.8569	Schwarz criterion	5.299993
Log likelihood	-127.7168	Hannan-Quinn criter.	5.098543
F-statistic	4.461211	Durbin-Watson stat	2.421974
Prob(F-statistic)	0.000469		

---



## Lampiran 4

### Random Effect Model

Dependent Variable: PE  
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 02/11/19 Time: 22:08  
 Sample: 2007 2017  
 Periods included: 11  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 55  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.399196	0.907100	3.747324	0.0005
GE	3.141856	1.234109	2.545851	0.0140
RQ	-0.732943	1.432349	-0.511707	0.6111
PSAV	-2.962827	0.885822	-3.344719	0.0016
VA	2.893011	1.211922	2.387127	0.0208
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			2.698054	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Adjusted R-squared	0.326732	S.D. dependent var		3.318467
S.E. of regression	2.722898	Sum squared resid		370.7088
F-statistic	7.551449	Durbin-Watson stat		2.350970
Prob(F-statistic)	0.000077			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Sum squared resid	370.7088	Durbin-Watson stat		2.350970

## Lampiran 5

### Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.231263	(4,46)	0.3108
Cross-section Chi-square	5.594246	4	0.2316

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PE  
Method: Panel Least Squares  
Date: 03/08/19 Time: 01:25  
Sample: 2007 2017  
Periods included: 11  
Cross-sections included: 5  
Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.399196	0.915452	3.713133	0.0005
GE	3.141856	1.245472	2.522622	0.0149
PSAV	-2.962827	0.893979	-3.314202	0.0017
RQ	-0.732943	1.445538	-0.507038	0.6144
VA	2.893011	1.223081	2.365347	0.0219
R-squared	0.376604	Mean dependent var		3.654145
Adjusted R-squared	0.326732	S.D. dependent var		3.318467
S.E. of regression	2.722898	Akaike info criterion		4.927779
Sum squared resid	370.7088	Schwarz criterion		5.110264
Log likelihood	-130.5139	Hannan-Quinn criter.		4.998347
F-statistic	7.551449	Durbin-Watson stat		2.350970
Prob(F-statistic)	0.000077			

## Lampiran 6

### Uji Haustman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.925051	4	0.2951

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
RQ	5.109330	-0.732943	12.711224	0.1013
GE	2.221217	3.141856	14.431409	0.8085
VA	-1.821216	2.893011	6.335197	0.0611
PSAV	-3.757524	-2.962827	6.023322	0.7461

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PE

Method: Panel Least Squares

Date: 03/08/19 Time: 01:27

Sample: 2007 2017

Periods included: 11

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.380769	4.776645	-0.289067	0.7738
RQ	5.109330	3.842245	1.329777	0.1901
GE	2.221217	3.994300	0.556097	0.5808
VA	-1.821216	2.793555	-0.651935	0.5177
PSAV	-3.757524	2.609215	-1.440097	0.1566

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables) -

R-squared	0.436893	Mean dependent var	3.654145
Adjusted R-squared	0.338962	S.D. dependent var	3.318467
S.E. of regression	2.698054	Akaike info criterion	4.971520
Sum squared resid	334.8569	Schwarz criterion	5.299993
Log likelihood	-127.7168	Hannan-Quinn criter.	5.098543
F-statistic	4.461211	Durbin-Watson stat	2.421974
Prob(F-statistic)	0.000469		

## Lampiran 7

### Analisis Statistik Deskriptif

	GE	PE	PSAV	RQ	VA
Mean	0.730543	3.654145	0.151502	0.64107	-0.38768
Median	0.897023	4.22	0.136825	0.588943	-0.40032
Maximum	2.436975	15.24	1.585588	1.825278	0.184837
Minimum	-0.49339	-2.466	-1.44279	-0.41586	-1.06154
Std. Dev.	0.957584	3.318467	0.999388	0.688005	0.346738
Skewness	0.307245	0.291074	-0.08379	0.288339	-0.24369
Kurtosis	1.855627	4.308291	1.48459	1.987372	2.254395
Jarque-Bera	3.866475	4.699112	5.327093	3.112024	1.818378
Probability	0.144679	0.095411	0.069701	0.210976	0.402851
Sum	40.17988	200.978	8.332611	35.25885	-21.3226
Sum Sq. Dev.	49.51618	594.6599	53.93397	25.56094	6.492261
Observations	55	55	55	55	55



